

TUGAS MATA KULIAH GLOBALISASI DAN DEMOKRASI

Prof. (RIS) Ikrar Nusa Bhakti, Ph.D

Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional
Universitas Padjadjaran Bandung

Ditulis oleh : **Z u l k a r n a i n (170330150006)**

Kebangkitan Ultra-Nasionalisme di Inggris; Sisi lain dari Brexit

Z u l k a r n a i n

Belum lama ini, tepatnya 23 Juni 2016 dunia dihebohkan oleh peristiwa politik penting yakni adanya keputusan Inggris yang memisahkan diri dari keanggotaan Uni Eropa atau biasa disebut dengan Brexit. Istilah Brexit digunakan seiring dengan berlangsungnya referendum masyarakat Inggris yang memilih keluar dari UE. Sebanyak hampir 52 persen pemilih menginginkan keluar dari UE, sementara 48 persen lainnya masih tetap ingin berada di UE dari hampir 46,5 juta orang yang terdaftar mengikuti referendum. Keesokan harinya, yakni 24 Juni 2016 Perdana Menteri Inggris David Cameron menyatakan mengundurkan diri usai referendum Brexit yang memastikan negara itu keluar dari Uni Eropa. Apa sesungguhnya yang terjadi dibalik Brexit dan bagaimana dampaknya terhadap negara-negara UE ?

Sebelum Brexit

Referendum yang identik dengan Brexit tersebut sebenarnya bukanlah pertama kali terjadi di Inggris Raya. Negara ini pernah melakukan referendum sebelumnya pada tahun 1975 apakah akan keluar dari UE atau tetap bertahan di UE. Pada saat itu pemerintahan Partai Buruh yang berkuasa mengadakan referendum, apakah Inggris meninggalkan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) atau tetap bergabung di dalamnya. Namun pada saat itu hasilnya Inggris tetap berada dalam bagian MEE (sekarang UE). Saat itu hasil referendum adalah 67% berbanding 33% dengan jumlah pemilih 64,5%. (*Sindonews.com, 24 Juni 2016*). Upaya Partai Buruh memenangkan Pemilu 1983 dengan platform akan menarik diri dari MEE mengakibatkan kegagalan, dimana pemerintah Partai Konservatif yang dipimpin oleh Margareth Thatcher terpilih kembali dengan selisih yang cukup jauh. Empat belas tahun

kemudian, empat tahun setelah MEE menjadi UE melalui perjanjian Maastricht (*Maastricht Treaty*) pada 1993 referendum partai baru terbentuk atas usulan Sir James Goldsmith pada Pemilu 1997. Isu yang diangkat pun tetap sama yaitu tentang keanggotaan Inggris di UE. Alhasil hanya 2,6% suara yang mendukung wacana tersebut dan gagal mendapatkan satu kursi di parlemen. Selanjutnya, PM David Cameron menolak seruan referendum terkait keanggotaan Inggris di UE pada tahun 2012. Namun kurang dari satu tahun kemudian, pemerintah Konservatif berjanji akan mengadakan referendum jika terpilih kembali pada tahun 2015. Segera setelah Cameron terpilih untuk masa jabatan kedua, UU Referendum diperkenalkan di parlemen Inggris yaitu pada bulan Februari 2016. Saat itu Cameron mengumumkan bahwa referendum akan diselenggarakan 23 Juni 2016. Setelah mengetahui hasil referendum yang menang adalah kelompok Brexit, Cameron mengumumkan pengunduran dirinya. (*Sindonews.com, 24 Juni 2016*).

Ekonomi Politik Brexit

Pertaruhan politik Inggris lewat pilihan masyarakatnya yang ingin keluar dari UE ini sebenarnya amatlah besar. Belum ada pihak yang bisa memastikan seperti apa dan bagaimana stabilitas baru Inggris pasca referendum, baik secara ekonomi, politik maupun sosial. Banyak pihak terutama negara-negara Eropa ingin Inggris tetap bergabung dalam UE. Sejarawan Inggris Simon Schama mengatakan bahwa pilihan keluar dari UE adalah sebuah bencana. Jika Inggris meninggalkan UE maka Inggris akan memasuki periode yang sangat gelap dan berbahaya di Eropa dan juga dunia. Pasar finansial kisruh di tengah referendum dengan nilai mata uang pound sterling dan euro yang anjlok. Para ekonom memprediksi, perekonomian Inggris akan hancur jika meninggalkan Eropa. (*CNN Indonesia, 24/06/2016*). Pada bagian lain, Ben Murtagh dari Universitas London memberikan komentarnya bahwa dalam waktu dekat Inggris ditaksir akan mengalami efek domino di bidang ekonomi skala besar akibat keluar dari Uni Eropa, yang selama ini memungkinkan pergerakan bebas barang dan manusia. Dampak buruk ekonomi itu tidak hanya dalam kaitan antara Inggris dan 27 negara anggota Uni Eropa, tetapi juga antara Inggris dengan negara-negara di luar Eropa. (*CNN Indonesia, 27/06/2016*). Arah menuju kemungkinan keterpurukan ekonomi itu memang dapat dilihat dari pergerakan pasar keuangan begitu hasil referendum diumumkan. Saham-saham berjatuh dan mata uang Inggris pound sterling turut anjlok. Dalam perdagangan mata uang, pound sterling menyentuh titik terendah selama 31 tahun terakhir terhadap dolar setelah referendum diumumkan.

Selain dari pada itu Brexit juga akan mengakibatkan Inggris akan kehilangan 100 miliar pound jika meninggalkan UE dan 950.000 orang PHK hingga tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi diprediksi oleh *Price Waterhouse Cooper* melambat hingga 0% pada tahun 2017-2018. Perusahaan-perusahaan Inggris juga akan kesulitan untuk mengganti SDM yang potensial keluar dari Inggris yang mengakibatkan perlambatan ekonomi terjadi. Di sisi lain Uni Eropa juga harus mencari anggaran tambahan sebesar 18 miliar Euro untuk mengisi pos yang ditinggalkan oleh Inggris. Intinya dari sisi ekonomi Inggris akan banyak dirugikan dari keputusan ini. Apalagi ekspor Inggris sebesar 45% ke Uni Eropa. Sehingga jika Inggris keluar dari UE, maka akan dikenakan tarif. Sama halnya jika melakukan transaksi dengan negara non UE lainnya.

Pada bagian lain kelompok yang pro terhadap Brexit berpandangan bahwa Inggris sudah saatnya keluar dari UE. Kelompok yang demikian ini meyakini bahwa jika Inggris hengkang dari UE maka Inggris akan bisa lebih mengatur perekonomiannya sendiri dan juga kebijakan imigrasi sendiri tanpa harus mengikuti regulasi UE. Mereka merasa UE telah membebani Inggris. Hal ini cukup beralasan, karena menurut *EU Budget 2015; Contributions by Country*, Inggris menempati urutan ketiga, yaitu sebesar 12,57 % bagi UE. Sedangkan urutan pertama dan kedua ditempati oleh Jerman (21,36 %) dan Prancis (15,72%). Dalam pandangan masyarakat yang pro Brexit, UE seakan-akan menjadi pemberi beban bagi Inggris dan memiliki pengaruh yang sangat besar bahkan melebihi kebijakan parlemen negaranya.

Bangkitnya Ultra-Nasionalisme

Keinginan mayoritas masyarakat Inggris yang memilih keluar dari UE dalam referendum Brexit, sesungguhnya adalah sebuah refleksi dari kerisauan nasional negara tersebut terhadap ancaman globalisasi dan liberalisasi. Kesadaran baru masyarakat Inggris Raya tengah bangkit kembali seiring meluasnya gelombang globalisasi dan liberalisasi. Referendum Brexit dari UE setidaknya memberikan jawaban logis kepada kita tentang apa sesungguhnya dibalik itu. Persoalan utama adalah karena Inggris dipaksa harus berbagi beban dengan anggota UE yang lainnya. Jika total budget yang dibutuhkan UE adalah 145 miliar Euro atau dirupiahkan saat ini sekitar 2.137 triliun rupiah maka porsi negara Inggris yang harus dibayarkan pertahun adalah 268 triliun rupiah atau kurang lebih 18 miliar Euro. (*EU Budget 2015*). Bagi Inggris, jumlah ini sangat besar, terlebih ditengah perekonomian dunia yang sedang lesu. Masyarakat Inggris menyadari betul bahwa anggaran negaranya banyak diberikan kepada Yunani, Polandia dan Hungaria. Oleh karena itu Inggris melalui Brexit

memutuskan untuk tidak lagi perlu bergabung dengan UE. Selanjutnya, Inggris juga menyadari bahwa arus migrasi yang terjadi dinegaranya itu telah membebani Inggris.

Munculnya sejumlah masalah ekonomi dalam negeri Inggris dinilai disebabkan oleh kedatangan imigran, terutama yang berasal dari Eropa Timur dan Asia serta Timur Tengah. Kedatangan kaum migran ini, secara langsung telah membuat penduduk pribumi Inggris terdesak. Hampir seluruh aspek pekerjaan yang tergolong rendah seperti pelayan toko dan lainnya diisi oleh kaum imigran, sedangkan penduduk pribumi Inggris Raya meskipun tidak bekerja di bidang itu merasa terancam. Oleh sebab itu mayoritas warga Inggris memilih untuk keluar dari UE. Keadaan yang demikian ini sesungguhnya membuat masyarakat Inggris resah. Dibalik itu semua, dapat diamati bahwa ini terkait dengan soal identitas nasional. Identitas nasional Inggris Raya disadari oleh mayoritas masyarakatnya sudah mulai terkikis, sehingga perlu dikembalikan lagi ke posisi semula. Identitas yang dinilai perlahan menghilang itu adalah Inggris Raya sebagai bangsa super dan pengatur/penentu (penakluk). Oleh karena itu, Inggris Raya tidak setuju kalau kedaulatannya (atau sebagian dari kedaulatannya) harus diserahkan kepada yang namanya institusi regional yang berbentuk supra nasional, yaitu UE. Inggris Raya merasa bahwa tidak perlu ada institusi lain seperti UE yang mengatur sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Kesadaran inilah yang memunculkan mayoritas masyarakat Inggris Raya sehingga keluar dari UE.

Dengan kemenangan kelompok Brexit ini, sesungguhnya ultra-nasionalisme Inggris Raya tengah hadir ke permukaan. Chauvinisme Inggris Raya tengah memperlihatkan tanda-tanda kehadirannya ditengah dinamika perpolitikan internasional. Kevin Golanda, Kolumnis CNN Indonesia dalam ulasannya yang berjudul *Inggris Keluar dari UE, Kelompok Anti Islam Bersorak*, menuturkan bahwa hasil referendum Brexit telah membuat kelompok-kelompok sayap kanan dan ultra-nasionalis di Eropa bersorak. (CNN Indonesia, 25/06/2016). Marina Le Pen, pemimpin partai sayap kanan Prancis, Front Nasional, mengaku bergembira sekali dan menyambut baik hasil referendum tersebut, dan menurutnya akan menjadi preseden juga di Prancis. Gerakan yang sama juga datang dari tokoh sayap kanan Belanda Geert Wilders, bersorak atas kemenangan referendum dan mengatakan bahwa hasil yang sama juga bisa terjadi di Belanda. Simak misalnya pernyataan yang dikeluarkan oleh Nigel Farage, salah satu pemimpin partai sayap kanan Inggris, UKIP, "saya sekarang berani bermimpi fajar kemerdekaan Inggris mulai datang". Dalam pandangan Farage yang dikenal sebagai sosok rasis dan yang pernah mengatakan bahwa mereka "tidak akan pernah mendapatkan suara negro" dan mengucapkan kalimat rasis terhadap warga China, kemenangan Brexit adalah

kemerdekaan masyarakat Inggris. (*CNN Indonesia, 24/06/2016*). Tokoh lainnya pendukung Brexit adalah Boris Johnson. Menurutnya Inggris mulai kebanjiran pengungsi akibat wilayah tanpa batas UE, membuat negara itu terancam jadi ladang perkosaan. Dalam kampanye Brexit UKIP membuat poster rasis soal gelombang pengungsi Suriah ke Inggris. Menurutnya Inggris mulai penuh imigran karena bergabung dengan UE. Kelompok-kelompok ultra-nasionalis di balik kemenangan referendum Brexit ini antara lain adalah organisasi supremasi kulit putih *English Defence League*, partai nasional ekstrem *Britain First* dan *British National Party* dan para aktivis *Neo-Nazi Inggris*. (*CNN Indonesia, 25/06/2016*).

Tanda-tanda ke arah kebangkitan ultra-nasionalisme di Inggris melalui kemenangan kelompok Brexit ini bahkan oleh sejumlah pengamat disamakan dengan tanda-tanda kebangkitan ultra-nasionalisme di Amerika Serikat melalui praktek kampanye yang dibawakan Donald Trump. Amanda Taub, seorang pengamat AS di harian NY Times dalam artikelnya yang berjudul *A Lesson From Brexit; On Immigration, feeling Trumps Facts*, mengulas bahwa kemenangan Brexit bukan tidak mungkin berdampak pada kemenangan kelompok Trump di AS. Ada kemiripan isu kampanye yang disuarakan oleh Trump dari Partai Republik AS dengan kelompok Brexit di Inggris. Isu-isu yang diangkat dalam kampanye Brexit seperti *nationalism, xenophobia and prejudice*, menurut Amanda Taub dalam artikelnya itu paralel dengan isu-isu yang diangkat oleh Trump, dan sangat potensial memenangkannya dalam pemilu presidennya di AS. *The dynamics is not limited to Britain, or to this referendum, it is playing out in democracies around the world, and immigration has become its focal point.* (*NYTimes, 2016/06/27*). Brexit, dengan segala dinamikanya memang telah memberi inspirasi bagi negara lain, baik di Eropa maupun di AS dalam rangka menyuburkan tumbuhnya masyarakat yang pro pada ultra-nasionalisme.

Kesimpulan

Brexit, sesungguhnya bukanlah sekedar sebuah fakta sederhana yang hanya dilihat dalam perspektif ekonomi politik internasional. Brexit juga memberikan pemahaman berharga kepada kita, betapa aspek nasionalisme menjadi bagian penting untuk mendapat perhatian. Isu nasionalisme atau isu-isu turunannya seperti isu nasionalisme baru, menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari fenomena Brexit ini. Setidaknya, Brexit telah memberikan gambaran kepada kita tentang kemana sesungguhnya trend dari bandul politik mengarah. Apalagi terjadi ditengah era yang sangat mengagung-agungkan globalisasi dan liberalisasi. **Pertama**, Brexit telah merefleksikan eksistensi kaum puritan dalam politik di Inggris. Oleh sejumlah

analisis, Brexit menunjukkan adanya kebangkitan kaum puritan politik di Inggris dan sekaligus dapat membawa pengaruh ke luar Inggris, terutama negara-negara di Eropa dan AS. Jika nilai-nilai puritan merasuki ekonomi politik modern Inggris, maka bukan tidak mungkin Eropa atau AS mengalami kemunduran-kemunduran. Kebangkitan kaum ultra-nasionalis adalah indikator penting dari trend politik tersebut. **Kedua**, dengan kemenangan pro Brexit, maka sangat berpotensi melahirkan ketidakstabilan di Inggris dan negara-negara di luar Inggris, terutama negara anggota UE. Penataan ulang akan menjadi pilihan utama yang harus diambil oleh pemerintahan baru Inggris. Pilihan kebijakan yang berorientasi pada “penataan ulang” justru akan berdampak pada perlambatan-perlambatan. Jika dimensi perlambatan ini tidak segera diatasi, maka akan memunculkan ketidakpuasan dikalangan masyarakatnya. Dengan demikian instabilitas sosial adalah harga yang harus ditanggung Inggris. **Ketiga**, Brexit telah memberikan peluang bagi lahirnya *chauvinisme*, baik di Inggris maupun negara-negara lain yang tengah menuju penguatan politik sayap kanan. Kehadiran chauvinisme dalam dunia modern dan yang notabene mengarusutamakan nilai-nilai demokrasi adalah sebuah kondisi yang sangat kontradiktif dan tidak diharapkan. Inggris tentu sangat menghindari hal yang demikian ini.

Hasil referendum memang menunjukkan Inggris keluar dari UE, namun membutuhkan setidaknya dua tahun untuk memproses keputusan ini. Selama masa negosiasi, Inggris tetap dianggap oleh negara UE dan harus mematuhi peraturan UE. Namun Inggris sudah tidak memiliki suara untuk pengambilan keputusan di UE. Diantara masa dua tahun inilah sesungguhnya pemerintahan baru Inggris mampu mengambil langkah-langkah kebijakannya, apakah mengikuti flat form Brexit ataukah tidak.

Daftar Referensi

CNN Indonesia, 24/06/2016.

CNN Indonesia, 25/06/2016.

CNN Indonesia, 27/06/2016.

NYTimes, 2016/06/27

Sindonews.com, 24 Juni 2016.

EU Budget 2015